

**ANALISA KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH BERMUATAN  
SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**PENULISAN HUKUM**

**Oleh :**

**FITRIANA KASIANI**

**201210110311050**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

**MUHAMMADIYAH MALANG**

**2016**

**LEMBAR PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM**

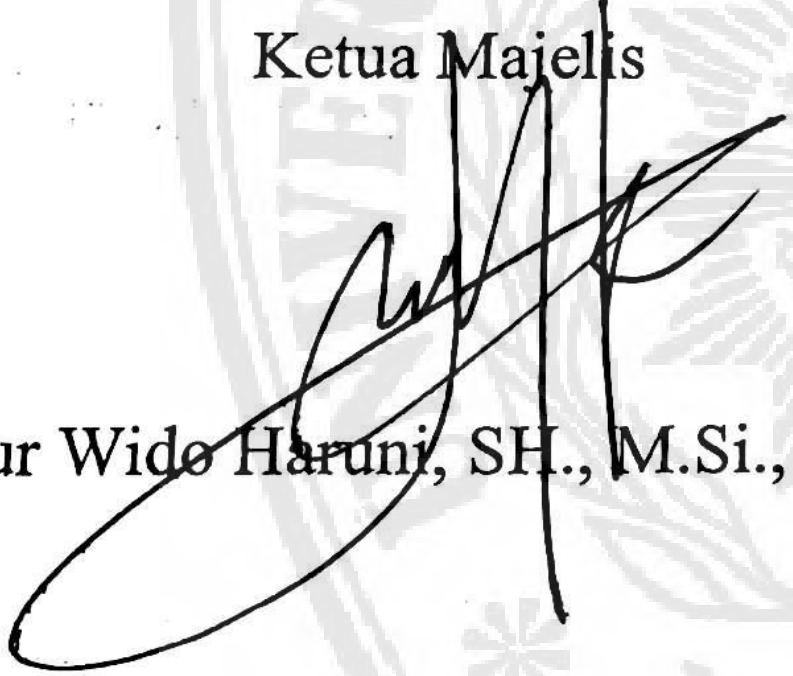
**ANALISA KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH BERMUATAN  
SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Disusun dan diajukan Oleh:  
Fitriana Kasiani  
Nim : 201210110311050


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Penulisan Hukum  
Pada Tanggal : 03 November 2016

**SUSUNAN MAJELIS PENGUJI**

Ketua Majelis

  
Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum.

Sekretaris Majelis

  
Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Anggota Majelis

  
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum.

  
Dr. Surya Anoraga, SH., M.H.

Mengetahui  
Dekan Fak. Hukum UMM



Dr. Sulardi, S.H., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriana Kasiani  
NIM : 201210110311050  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

**Analisa Kedudukan Perda Bermuatan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajkan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Oktober 2016

Saya menyatakan,



Fitriana Kasiani

## **Kata Pengantar**

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan yang memegang kendali seluruh alam semesta. Shalawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasullullah SAW Sang Pemimpin seluruh umat.

Alhamdulillah penulis akhirnya menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **Analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan Syariah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tugas akhir ini tidak mampu penulis selesaikan tanpa adanya dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Sulardi., S.H., M.Si sekaligus sebagai dosen pembimbing II penulis. Terima kasih untuk semua bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Ibu Catur Wido Haruni., S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas bimbingan serta nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Almarhum kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Mutoyo AS (pakde), seluruh keluarga penulis, serta Abi, Bunda, dan adik-adik Babussalam yang



menemani hampir 12 tahun. Terima kasih untuk setiap senyum dan nasehatnya. Doa terbaik selalu untuk kalian.

6. Kawan-kawan Kelas A Perwalian Ibu Komariah, SH., M.H, teman-teman angkatan 2012, sahabat terbaik Pamela Devi Lolita, SH dan Risma Reni Juwita, SH. Terima kasih untuk 4 tahun yang luar biasa.
7. Teman-teman terbaik penulis dalam berdialektika, keluarga besar HMI Komisariat Hukum UMM. Tanpa kalian tidak ada artinya 4 tahun menempuh pendidikan di FH UMM. Tidak ada proses yang sia-sia, tidak ada proses yang tidak jadi sama sekali, dan tidak ada proses yang tidak dihargai. Yakusa
8. Team(matte) Maulana Malik I, Gurnita Ning K, Febriansyah R, Distya P, Putri S, Sunarto E, serta seluruh teman & adik di Komunitas Riset dan Debat FH UMM. Terus berkembang dan kibarkan bendera almamater di setiap podium kompetisi. See you on top guys ☺

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan-kebaikan tersebut, semoga Allah selalu memberikan cinta kasihnya kepada kita semua. Penulis menyadari tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, maka kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk penulis tapi untuk yang membacanya.

Malang, 15 Oktober 2016

Fitriana Kasiani



## DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat .....	iv
Abstraksi .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat dan Kegunaan .....	8
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Negara Hukum .....	13
B. Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-undangan .....	16
C. Hirarki Norma Hukum ( <i>stufentheorie</i> ) .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Syariah .....	23



1. Syariah dan Hukum Islam .....	23
2. Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Islam .....	25
E. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	27
D. Pembagian Urusan Pemerintah dan Daerah .....	31
1. Desentralisasi.....	31
2. Otonomi Daerah .....	34
3. Pengawasan Peraturan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014.....	38

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Peraturan Daerah Bernuasa Syariah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	44
B. Implikasi Hukum Peraturan Daerah Bermuatan Syariah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	70

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	80

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perda Kabupaten/Kota tentang Pengaturan Berbusana, Wajib Baca Al-qur'an serta Pemberlakuan Syariat Islam .....	56
Tabel 2 Perda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Zakat .....	57
Tabel 3 Perda Kabupaten/Kota tentang Kesusilaan .....	59
Tabel 4 Perda Kabupaten/Kota tentang Minuman Beralkohol .....	60
Tabel 5 Perda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Ibadah Haji .....	62
Tabel 5 Perda Provinsi .....	64



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Gaffar Karim (edt.), 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Rofiq. 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- A. Hamid. S Attamimi. 1990, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia
- Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra. 2010, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Aziz Syamsuddin. 2013. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang* (edisi kedua), Jakarta: Sinar Grafika
- Bagir Manan & Kuntana Magnar. 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Gusti. B. Menoh. 2015, *Agama dalam Ruang Publik Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, Sleman: PT Kanisius
- Hans Kelsen, 2015, *Terjemahan dari buku General Theory of Law and State (New York: Russel, 1971)*, Bandung: Nusa Media

Harry Friedman. 1983, *“Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries”*, dalam G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Editors), London: Sage Publications

Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia

J.J. Von Schmid. 1959, *Ahli-ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Terjemahan Wiratno dan Djamaludin Dt. Singomangkuto, Jakarta: PT. Pembangunan

Lukman Hakim. 2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Malang: Setara Press

Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius

Masjifuk Zuhdi. 1995, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Toko Gunung Agung

Muhammad Muslehuddin. 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (terjemahan Yudian Wahyudi Asmin), Yogyakarta: Tiara Wacana

M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

M. Tahir Azhary. 1992, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang

Ni'matul Huda. 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press

Philips M. Hadjon. 1985, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2011, *Argumentasi Hukum*, cet V, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Ridwan. 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press

Saidus Syahar. 1996, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni

Satjipto Rahardjo. 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

Sirajudin, dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press

Sirajudin, dkk., 2016, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers

Sudikno Mertokusumo. 2009, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Somardi. 2007, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo. 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti

Tjahya Supriatna. 1992, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara

Zainudin Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Haji

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Jemaa

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh

Peraturan Daerah Kabupaten Meranti Nomor 5 Tahun 2015 tentang Zakat

### **Makalah Dan Jurnal**

Muhtada Dani, 2014. *Perda bermuatan syariah Di Indonesia : Penyebaran, Problem, dan Tantangannya*, disampaikan dalam orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang.

A. Hamid S. Attamimi. 1992. *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Makalah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992

Denny Indrayana. 2010. *Kompleksitas Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Perspektif Hukum Tata Negara*. Jurnal Yustisia edisi 81 September-Desember

Victor Silaen. 2011, *Otonomi Daerah dan Perda-Perda Bias Agama*, dalam Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011, FISIP UNTIRTA

**Website**

[www.indonesia-investment.com/id/budaya/item6](http://www.indonesia-investment.com/id/budaya/item6)

[www.jdih.setjen.kemendagri.co.id](http://www.jdih.setjen.kemendagri.co.id)

